

PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Oleh : Samsul Nizar
Ketua STAIN Bengkalis
samsul_nizar@yahoo.co.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan pernah menjadi “kiblat pendidikan” bagi negara di kawasan ASEAN. Data ini merupakan potensi yang besar bagi memiliki institusi pendidikan Islam yang berkualitas. Namun, dalam tataran realitas saat ini, belum banyak institusi pendidikan Islam di negeri ini yang mampu muncul agresif menjawab perkembangan zaman, terutama di kawasan ASEAN. Di antara akan penyebab ketidakmampuan institusi pendidikan Islam adalah pola pendidikan yang ditawarkan masih bersifat dikotomik. Pendidikan Islam perlu disinergikan dengan melakukan transformasi ilmu pengetahuan, bahasa, IT, nilai-nilai agama dan budaya pada peserta didik. Melalui upaya ini, kualitas lulusan pendidikan negeri ini akan memiliki keunggulan dan sekaligus nilai jual lebih baik. Melalui upaya merenovasi format pendidikan Islam yang berkualitas, maka kualitas lulusan akan dapat bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan di kawasan ASEAN, sehingga mampu meningkatkan ekonomi bangsa.

Keyword : Pendidikan Islam, Unggul, Masyarakat Ekonomi ASEAN

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu kemestian dalam kehidupan manusia, apatahlagi di era masyarakat ekonomi ASEAN saat ini. Manusia tidak akan bisa berkembang dan mengembangkan kebudayaannya secara sempurna bila tidak ada pendidikan. Dinamika dan perubahan pranata sosial modern yang demikian dinamis merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah, sebab telah menjadi sifat dasar dari segala yang ada di muka bumi. Pendidikan sebagai usaha dan karya manusia, tentu juga tak luput dari “hukum” tersebut; kalau mampu mengikuti irama perubahan, maka ia akan “*survive*”. Sebaliknya kalau lamban, maka cepat atau lambat pendidikan akan tertinggal dan ditinggalkan di landasan kejumudan. Untuk itu, agar pendidikan (Islam) tetap “*survive*”, maka perlu keberanian mengadakan perubahan-perubahan esensial secara periodik. Bahkan, kalau ingin “maju” (berkembang) dan bukan hanya “*survive*,” maka harus diadakan perubahan yang lebih fundamental sebagai “antisipasi” ke masa depan sesuai dengan trend yang berkembang. Untuk itu, tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa eksistensi pendidikan merupakan salah satu syarat yang mendasar bagi meneruskan dan mengekalkan kebudayaan manusia. Di sini, fungsi pendidikan berupaya menyesuaikan (mengharmonisasikan) kebudayaan lama dengan kebudayaan baru secara proporsional dan dinamis. Pertanyaan besar ini paling tidak merupakan persoalan yang harus dijawab oleh sistem dan kebijakan pendidikan kita. Hal ini

disebabkan karena pendidikan memegang amanat tertinggi bangsa ini sebagai sarana untuk membina dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 ; “untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bahkan kemudian secara tegas dinyatakan dalam amanat pasal 31 UUD 1945 dan Perubahannya menyebutkan, bahwa : “(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.” Untuk mencapai maksud yang diamanatkan pasal 31 UUD 1945 dan Perubahannya, maka dirasakan perlu menyusun Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dengan visi, misi, dan strategi yang mendapatkan tujuan pendidikan nasional yang dimaksud.

Dari kekuatan yuridis di atas dan kebijakan yang telah dilakukan, kita harus jujur mengakui bahwa pendidikan nasional telah cukup banyak memainkan peranannya secara positif. Namun, dalam tataran pelaksanaan masih belum maksimal dalam melahirkan keperibadian yang ideal. Agaknya, saatnya sudah sangat mendesak agar bangsa ini bercermin kepada bangsa yang telah mencapai kemajuan pada dimensi intelektual dan senantiasa kokoh dalam dimensi moralitasnya (pendidikan agama). Katakanlah bangsa seperti Jepang, China, Singapura, Malaysia, dan Korea. Untuk kasus Malaysia, mungkin kita boleh bangga dengan sejarah, bahwa kita pernah menjadi “guru” yang telah membuka cakrawala mereka. Tapi, kini kondisi historis tersebut justru bertolak belakang. Mereka mampu menghasilkan *out put* pendidikan yang berkualitas secara intelektual, akan tetapi kokoh dalam mempertahankan etika dan adat mereka. Adapun kunci keberhasilan mereka terletak pada *political will* penentu kebijakan terhadap bidang pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Ketika mereka sadar dengan ketidakmampuan mereka di bidang intelektual, maka strategi kebijakan yang mereka tempuh adalah dengan melakukan *human resources*, bukan *material resources*. Melalui pendekatan *human resources*, mereka telah mampu menghasilkan kualitas SDM yang tinggi. Dalam hal ini, negara-negara yang maju dalam dunia pendidikannya, tidak mau menerapkan kebijakan *material resources*. Mereka sadar, bahwa apabila yang diterapkan pada pendekatan *material resources*, maka yang muncul –mungkin-- kemegahan fisik, tapi menghasilkan kualitas SDM yang rapuh (Samsul Nizar, edisi 12 Juni 2003).

AKAR PERSOALAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan pernah menjadi “kiblat pendidikan” bagi negara di kawasan ASEAN. Data ini merupakan potensi yang besar bagi memiliki institusi pendidikan Islam yang berkualitas. Namun, dalam tataran realitas saat ini, belum banyak institusi pendidikan Islam di negeri ini yang mampu muncul agresif menjawab perkembangan zaman, terutama di kawasan ASEAN. Di antara akan penyebab ketidakmampuan institusi pendidikan Islam adalah pola pendidikan yang ditawarkan masih bersifat dikotomik. Di satu sisi pendidikan umum yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda terkesan kurang kondusif bagi lahirnya dinamika umat, serta hampa dari nilai-nilai Islam. Pelaksanaannya hanya menyentuh segelintir elit masyarakat Indonesia. Akibatnya, mayoritas umat Islam tetap tertinggal dan terkebelakang. Hal ini bisa dimaklumi karena kekhawatiran kolonial Belanda terhadap umat Islam yang akan mengancam eksistensinya di Indonesia. Sedangkan di sisi lain, pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh umat Islam sendiri masih terkesan sangat eksklusif, dogmatis, dan tradisional. Pendidikan yang ditawarkan hanya berorientasi pada ilmu-ilmu keagamaan dan mengambil jarak terhadap ilmu-ilmu umum, sebagai produk warisan “kaum kafir” (kolonial). Materi yang dipelajari masih berkisar nahu, syaraf, bayan, tafsir, dan sejenisnya. Materi diberikan secara teoritis dalam bentuk hafalan, tanpa muatan analisa secara kritis terhadap materi yang dipelajarinya secara sempurna. Pendekatan ini tel-

ah mengakibatkan banyak di antara siswa waktu itu yang bisa membaca suatu kitab, akan tetapi tidak bisa menuliskan kembali dari apa yang dibacanya, serta bersikap “taklid” terhadap kebenaran ilmu yang diperolehnya. Sistem pendidikan yang demikian secara tidak disadari telah mengingkari dinamika *fitrâh* yang dimiliki peserta didik sebagai kekuatan fundamental psikologis manusiawi. Sikap yang demikian merupakan ekspresi dan apresiasi umat yang keliru dalam memahami universalitas ajaran Islam. Untuk keluar dari kebekuan dan kesalahfahaman yang telah membelenggu dinamika intelektual umat hanya bisa diantisipasi tatkala pola dan sistem pendidikan yang selama ini dipraktikkan umat Islam, mengalami inovasi dan beradaptasi dengan sistem pendidikan modern. Hanya saja, proses adaptasi tersebut hendaknya dirancang secara cermat, sehingga tidak terlepas dari ruh religiusitas ajaran Islam. Pendekatan ini akan bisa menyadarkan umat Islam akan ketertinggalannya. Kesadaran ini pada gilirannya akan mampu menjadi motivasi bagi umat Islam untuk berfikir dinamis dan rasional. Materi pendidikan harus mampu merespon dinamika pemikiran peserta didik secara optimal. Dengan pola pendidikan yang demikian, pada gilirannya akan membantu berkembangnya kreativitas peserta didik dan kemudian melahirkan pemikir-pemikir Islam yang profesional dalam mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Perlunya memformulasi sistem pendidikan Islam yang proporsional, disebabkan karena pendidikan merupakan salah satu aspek yang strategis dalam upaya meluruskan dan membentuk pandangan masyarakat tentang Islam secara *kaffah*. Pembaruan visi pendidikan yang demikian dilatarbelakangi oleh orientasi pendidikan umat (Islam) yang masih berorientasi pada ilmu-ilmu agama *an sich*, melalui pendekatan normatif-religius. Di sisi lain, ada pula format pendidikan yang dikembangkan telah tercerabut dari nilai-nilai ilahiah. Seyogyanya, orientasi pendidikan umat harus menyentuh dan mengakomodir aspek normatif-religius dengan aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan masyarakat (modern) secara harmonis dan integral.

Untuk merubah visi masyarakat yang demikian, maka alternatif strategis yang ditempuh adalah dengan melakukan pembaruan terhadap sistem pendidikan Islam –terutama-- yang selama ini dipertahankan oleh masyarakat tradisonal. Ide-ide pembaruan pola pendidikan yang dilakukannya, pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam yang dinamis dan mampu berpikir kritis-rasional. Dalam hal ini, ia mencita-citakan tumbuhnya praktik berfikir kritis sebagaimana telah dikembangkan oleh intelektual muslim pada zaman keemasan Islam. Ketika itu, perkembangan pendidikan tidak bersifat dualistik, akan tetapi bersifat inklusif dan integral, serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dinamika intelektual yang demikian pada gilirannya akan sangat membantu umat Islam mengejar ketertinggalannya selama ini. Munculnya sekolah-sekolah agama dengan versi dan warna baru, serta sarat dengan pesan-pesan yang bersifat inovatif dan modernis, sangat diperlukan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan ikut membentuk pola pemikiran umat lebih dinamis, adaptik, dan proporsional. Oleh karenanya, paradigma pembaruan pendidikan yang dikembangkan perlu lebih bersifat sebagai *renaissance* Islam bagi terwujudnya –meminjam istilah Natsir-- *Islamiyeh Paedagogisch Ideaal*. Paradigma “baru” yang dikembangkan di atas, pada prinsipnya memiliki dasar pikir bahwa dalam perkembangannya, pendidikan Islam senantiasa dihadapkan pada tantangan yang berat dan kompleks, di banding tantangan yang harus dihadapi pada masa-masa sebelumnya. Tantangan tersebut telah menimbulkan aspirasi dan idealitas *multi interest* umat dalam menghadapi tuntutan hidup yang demikian kompleks. Untuk itu, alternatif pertama yang harus dilakukan adalah berusaha menghilangkan persoalan intern umat Islam. Persoalan-persoalan teologis yang difahami secara tradisional yang dianggap sebagai penghalang kemajuan, terutama dalam proses berfikir yang bersifat taklid, harus dihilangkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah memformulasi bentuk modernisasi dengan mempertimbangkan nilai fungsional bagi

umat. Mempertimbangkan paradigma modernisasi pendidikan yang demikian, disebabkan karena visi dan misi pendidikan Islam tidak lagi hanya sebatas mengantarkan manusia mencapai tujuan psikis-religius dengan menekankan pada pendidikan agama, akan tetapi juga psikis duniawi dengan menekankan pada pendidikan umum. Sistem pendidikan Islam era modern harus mampu menggabungkan kedua orientasi tersebut secara serasi dan seimbang. Untuk itu, pendidikan Islam era modern harus diformat dalam “paradigma baru” sejalan dengan akselerasi zaman, tanpa kehilangan identitas Ilahiah. Sistem pendidikan Islam yang ideal seyogyanya berorientasi pada visi keakhiratan sebagai alat kontrol perilaku manusia, sekaligus visi kekinian dengan mengaktifkan fungsi akal peserta didik secara maksimal. Persentuhan kedua aspek tersebut secara harmonis dan integral, akan mampu menciptakan sosok peserta didik yang memiliki kepribadian paripurna (*insan kamil*). Melalui agama, dinamika rasio akan terkontrol dengan baik. Sedangkan melalui ilmu umum (rasional), akan ikut menyiapkan umat Islam mampu menjawab berbagai tantangan dinamika zaman secara aktif, dinamis, dan proporsional.

URGENSI PENDIDIKAN ISLAM; ANTARA IMPIAN DAN REALITA

Paling tidak ada tiga kelompok besar prototipe *out put* pendidikan dari hasil sistem yang parsial selama ini, yaitu : **Pertama**, memiliki kemampuan intelektual yang mampu menguasai teknologi mutakhir, akan tetapi kurang mampu menghayati nilai-nilai ajaran agama dan karakter yang bermoral. Akibatnya, seringkali berbagai hasil olah keterampilannya kurang memperhatikan nilai-nilai moralitas, bahkan terkesan untuk memperkaya pribadi atau golongan. Kebijakan politik seringkali sulit untuk dirujuk pada etika mana diambil. Bahkan sangat sulit untuk dikatakan apakah politik yang dimainkan masih mengemas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika (akhlak). **Kedua**, memiliki kemampuan intelektual yang mampu menguasai dan menghayati nilai-nilai luhur ajaran agama, akan tetapi tidak mampu menguasai teknologi dan dinamika politik yang ada di dalamnya (Samsul Nizar, 2005). **Ketiga**, kegaman antara kedua kutub ilmu yang terasa “gagal” dalam menyatukannya dalam satu kutub yang harmonis.

Tatkala UUD 1945 pasal 31 (1) menjelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Namun, pernyataan tersebut dalam realitas hanya menyentuh segelir warga negara akibat mahalnya biaya pendidikan. Seakan-akan, pendidikan yang berkualitas hanya hak kelompok yang memiliki tingkat ekonomi tinggi saja. Tatkala negara memunculkan program WAJAR 9 tahun, tanpa terproteksi justru pada waktu bersamaan lembaga pendidikan yang masuk kategori WAJAR 9 tahun menetapkan biaya pendidikan yang sangat tinggi, terutama bila ingin memasuki lembaga pendidikan berkualitas. Bagaimana mungkin kebijakan yang paradok ini terjadi ?. Hal ini juga terjadi bagi perguruan tinggi dengan status Badan Hukum Pendidikan (BHP) bagi yang memiliki status mahasiswa dari latar belakang ekonomi kaya karena menuntut biaya pendidikan yang mahal dan Badan Layanan Umum (BLU) bagi yang memiliki status mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah. Pendidikan dewasa ini telah bergeser menjadi lembaga “kapitalisasi, kastanisasi, dan liberalisasi”. Padahal, amanat UUD 1945 mengamanahkan agar negara menjamin seluruh warganya mengenyam pendidikan yang berkualitas.

Persoalan di atas merupakan gambaran umum kegagalan pendidikan saat ini sebagai konsekuensi dari kesalahan penetapan kebijakan pendidikan. Padahal, tujuan yang dibebankan pada dunia pendidikan sangat besar dan berat. Di sini kelihatannya, seolah-olah kita telah memainkan politik dagang yang sangat jitu. Kurikulum yang ditawarkan terkesan tidak progresif dan berjalan ditempat. Isi kurikulum tidak memenuhi prinsip kontinuitas dan fleksibilitas. Akibatnya, rumusannya hanya berbesar pengulangan materi ajar pada lembaga pendidikan sebelumnya yang kaku dan tak mampu men-

jawab berbagai persoalan kekinian, apatahlagi memprediksikan persoalan 5 atau 10 tahun yang akan datang, sebagaimana kurikulum pendidikan yang ditawarkan di negara-negara maju. Meski kurikulum pendidikan mengalami perubahan dengan alasan menyesuaikan dengan akselerasi perkembangan zaman dan upaya memajukan pendidikan, maka muncullah kurikulum 1984, kurikulum 1994, KBK 2004, KTSP 2006, kurikulum 2013 yang kemudian kembali menjadi kurikulum 2006. Untuk itu, diperlukan biaya milyaran rupiah untuk keperluan revisi kurikulum. Namun, biaya yang besar tersebut tidak signifikan dengan hasil (kualitas) pendidikan yang dicapai, justru cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan antara IQ, EQ, dan SQ. Bila hal ini tetap menjadi fenomena yang mengapung ke permukaan, maka tidak heran bila bangsa ini pada suatu saat tidak lagi diperhitungkan oleh bangsa lain, terutama masyarakat di kawasan ASEAN. Hal ini disebabkan karena masih “kebingungan” menetapkan format pendidikan yang diinginkan. Sementara masyarakat di kawasan ASEAN lainnya sudah *landing* atas format pendidikannya.

Sudah sangat mendesak bagi bangsa ini bercermin kepada bangsa yang telah mencapai kemajuan pada dimensi intelektual dan senantiasa kokoh dalam dimensi moralitasnya (karakter religius). Katakanlah bangsa seperti Jepang dan Korea. Mereka mampu menghasilkan *out put* pendidikan yang berkualitas secara intelektual, akan tetapi kokoh dalam mempertahankan etika dan adat budayanya. Adapun kunci keberhasilan mereka terletak pada *political will* penentu kebijakan terhadap bidang pendidikan. Ketika mereka sadar dengan ketidakmampuan mereka di bidang intelektual, maka strategi kebijakan yang mereka tempuh adalah dengan melakukan *human resources* yang berkarakter, bukan hanya *material resources*. Melalui pendekatan *human resources*, mereka telah mampu menghasilkan kualitas SDM yang tinggi. Dalam hal ini, negara-negara yang maju dalam dunia pendidikannya, tidak mau menerapkan kebijakan *material resources*. Mereka sadar, bahwa apabila yang diterapkan pada pendekatan *material resources*, maka yang muncul –mungkin-- kemegahan fisik, tapi menghasilkan kualitas SDM yang rapuh. Fenomena ini terlihat jelas dalam potret pendidikan kita dewasa ini (Samsul Nizar [ed.], 2005).

Dalam hubungannya dengan kondisi pendidikan dewasa ini, Tilaar menyatakan bahwa Pendidikan nasional dewasa ini dihadapkan pada empat krisis pokok, yaitu : berkaitan dengan kuantitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih jauh dikemukakan bahwa sedikitnya ada delapan masalah pokok sistem pendidikan nasional: (1) menurunnya moral dan akhlak peserta didik, (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan, (3) rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, (4) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan nasional, (5) masih rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan dan pelatihan, (6) kelembagaan pendidikan dan pelatihan, (7) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan (8) sumber daya yang belum profesional (H.A.R. Tilaar, 1999 : 49-51).

Dengan berbagai kendala dan kegagalan pendidikan nasional dalam menciptakan sosok *out put* yang berkepribadian paripurna, merupakan hambatan yang sangat mengganggu kelahiran Indonesia Baru sebagai perwujudan masyarakat madani. Dengan persoalan, menjadi alasan untuk kembali mempertanyakan bagaimana bangunan sistem pendidikan kita. Apakah bangunannya keliru karena berangkat dari kesalahan dalam memaknai pendidikan yang ideal, atau terlepasnya bangunan konsep pendidikan yang ditawarkan dari nilai-nilai Ilahiah ?

MEMBANGUN PENDIDIKAN ISLAM IDEAL; MASIHKAN ADA HARAPAN UNGGUL DI ASEAN ?

Menurut Hamka, “kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada kesempurnaan sistem pendidikan dan pengajaran yang ditawarkannya” (Hamka, 1962 : 13). Perkembangan suatu sistem pendidikan dan lembaga yang mewadahnya memiliki keterkaitan dengan perkembangan masyarakat

secara keseluruhan, baik cita-cita, tata nilai yang dianut, kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikis, perubahan orientasi sosial, serta prioritas-prioritas perjuangannya. Pendidikan bagi suatu masyarakat berfungsi sebagai *social machine* yang bertanggungjawab untuk merekayasa masa depannya, menjawab berbagai persoalan kehidupan umat manusia, sekaligus melestarikan nilai-nilai dan warisan-warisan sosial-kultural di mana pendidikan itu dilaksanakan.

Melihat demikian strategisnya pendidikan bagi manusia, maka tidak berlebihan jika --secara tegas-- Fazlur Rahman, seorang neo-modernis Pakistan, mengatakan bahwa pembaharuan dunia Islam mesti dimulai dari pendidikan. Melalui pembaharuan di bidang pendidikan, memungkinkan intelektual muslim mampu menghasilkan solusi jangka panjang yang tepat bagi masalah-masalah yang sedang dihadapi umat Islam (Fazlur Rahman, 1979 : 260). Wacana pemikiran pendidikan, berarti membicarakan masalah kemanusiaan yang demikian rumit. Orientasi proses pelaksanaannya, baik dalam kerangka konsep maupun operasionalisasinya berpijak pada aspek manusia itu sendiri. Kerangka tersebut meliputi pembicaraan terhadap beberapa komponen pendidikan, yaitu ; pendidik, peserta didik, perumusan tujuan, materi, penggunaan alat dan metode, interaksi proses belajar mengajar, serta lingkungan --termasuk adat dan tata nilai sosial-- di mana pendidikan itu berlangsung.

Untuk mewujudkan interaksi proses pendidikan yang ideal, maka seorang pendidik hendaknya memiliki sikap dan syarat-syarat sebagai pendidik. Syarat-syarat yang ditawarkan Hamka antara lain dapat dilihat dari pandangannya :

Hendaklah perjalanannya hidupmu [pendidik] bersama murid-muridmu dengan lurus dan pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. ... penuntut ilmu dan pentjari adab, djanganlah mereka melanggar garis Allah. Kenallah akan adat istiadatmu dan peliharakan kedudukan martabatmu. Hendaklah kamu menjadi katja jang djernih dan bertjahaja untuk ditilik oleh murid-muridmu, supaya menjadi tjontoh teladanan kesopanan. Djauhkanlah dirimu dari perbuatan jang kedji tertjela ... Djangan dibitjarakan dihadapan mereka [murid] perkara jang menimbulkan kebentjiaan. Bersikaplah terus terang dan djudjur. Djangan berbitjara dengan mereka sebahagian dan sebahagian lagi disisih-sisihkan. Djanganlah mereka dididik dengan tipuan, djangan terlebih dekat hubungan dengan murid tertentu lantaran banjak pemberianja. Beri mereka pengadjaran menurut kepantasan penerimaan mereka. Djangan dibiarkan mereka merendahkan derdjat ilmu, supaya djangan pula rendah derdjat sendiri. Pada pemandanganja seketika mengadjarakan ilmu itu. Djangan diperdulikan bajangan jang akan musnah dan kelezatan jang akan habis. Karena akan rusak binasalah keichlasan dan kedudukan martabatmu. Malulah djuga kepada mereka , peliharalah, hormatilah dirimu dan muridmu djuga dengan memberikan wasiat-wasiat jang berarti. Dan djangan menundukkan sembarang ilmu atau adab, kalau tidak pada tempat dan waktunja, supaya djangan mendjemukan. Tjintailah mereka sebagai mencintai kemanusiaan, ... Ketika kamu [pendidik] hendak memperbaiki kelakuanja jang djahat jang berkehendak kepada memukul, djanganlah memukul karena marah, dan djangan pula mereka dilengahkan. Djangan dibiarkan mereka djalan sendiri dengan tidak diberi batas. Disamping kamu memberikan pengadjaran dunia, sekali-kali djangan lupa memberikan pengadjaran rohani. Dan kalau pengadjaran jang kamu berikan itu berat rasanja bagi otaknja, sehingga perlu kepada obat, berikanlah obat jang dapat mendjernihkan otak itu kembali, supaya adalah bekas ilmumu jang banjak itu kepadanya, walaupun sedikit ... Adjar mereka membiasakan makan dengan berwaktu, ... Larang sekali-kali menuruti nafsu sjahwat didalam perkara jang terbiasa pada waktu menjadi murid, sehingga selamat dia kelak setelah hidup sendiri. Sebaik-baiknja hendaklah diangkat didalam kalangan mereka, seorang murid jang tertua untuk mengepalai mereka... Memberikan pengadjaran sopan santun hendaklah diukurkan dengan keadaan dan tingkatan murid dan otaknja. Pikulkan kepada mereka apa jang sanggup mereka memikul... Mula-mula sekali, sebelum kamu masuk kedalam

medan ini, bersihkanlah dirimu, bersihkan aibmu. Karena ilmu itu sutji, tidaklah dapat didekati oleh orang yang kotor... Tidaklah ada suatu perkara yang paling tertjela daripada perbuatan orang yang mengaku berakal, menundjuk mengadjar orang lain kepadaberakal, padahal dirinya sendiri sunji dari budi dan penuh dosa. Jang sebaik-baik hikmat hidup ialah mempertjaji Allah... Hendaklah kamu sekalian sudi mendengar, mengikuti dan setia mempertahankan kebenaran dan hikmat. Hendaklah bersungguh-sungguh, berdjwang mentjapai kebenaran, sudi kepada kedjudjuran... Sekali-kali djangan memikul keberatan takbur... Lazimi membatja kitab-kitab menerangkan budi pekerti dan djangan bosan... Makanlah makanan yang sehat, djauhi loba, tamak dan tjamar... Djangan bersuara keras dekat orang tua, djangan selangi perkataanja, djangan gatal lidah... Biasakan duduk sendiri, bermenung dan tafakkur... Djangan lekas marah" (HAMKA, 1962 : 198-201 ; Samsul Nizar, 2008).

Pandangan di atas secara jelas menuntut pendidik agar memiliki kualitas intelektual yang prima, profesionalitas sebagai pendidik, kemampuan didaktik metodik keguruan, dan kepribadian yang mulia guna menjadi contoh bagi peserta didiknya. Untuk itu, proses perekrutan pendidik selama ini yang menekankan pada aspek intelektual dan belum menyentuh aspek keguruan, perlu difikirkan kembali. Jika hal ini tidak dilakukan, maka pendidikan negeri ini akan semakin memprihatikan.

Sementara kedudukan dan kewajiban peserta didik adalah berupaya memiliki akhlak mulia, baik secara vertikal maupun horizontal dan senantiasa mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan seperangkat ilmu pengetahuan, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah melalui *fitrah*-Nya (Q.S. 17 : 24). Dalam ayat tersebut, dijelaskan tentang pentingnya etika antara peserta didik dan pendidik. Meskipun seorang anak atau peserta didik telah berhasil memiliki ilmu pengetahuan dan kedudukan yang tinggi, akan tetapi ketika dihadapan orang tua –maupun pendidik-- hendaklah ia merendahkan diri dan menunjukkan akhlak yang mulia. Sikap yang demikian dapat memperhalus rasa kemanusiaan dan pengabdian peserta didik, baik kepada kedua orang tuanya, guru-gurunya, maupun –terutama-- terhadap Khaliqnya.

Dengan keluasan ilmu dan kehalusan akhlak yang dimilikinya, peserta didik dapat mengendalikannya diri, membersihkan hati, memiliki wawasan yang luas, dan meraih kesempurnaan. Melalui ilmu yang dimilikinya, peserta didik dapat mengenal Khaliqnya dan menambah keimanannya. Peserta didik hendaknya mencari guru yang banyak pengalamannya, luas ilmu pengetahuannya, bijaksana, pemaaf, tenang dalam memberikan pelajaran, dan sabar dalam menuntun serta mengarahkan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Sosok pendidik yang demikian akan sangat membantu peserta didik untuk senantiasa mengadakan kontak personal (diskusi) dengannya dari berbagai bidang keilmuan. Melalui kontak personal tersebut, akan terjalin ikatan batin antara peserta didik dan pendidik secara harmonis. Sikap ilmiah yang demikian sangat bermanfaat bagi peserta didik dalam rangka menyerap dan menguasai seluruh ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang pendidik (Hamka, 1962 : 200-1 ; Syeikh Abdus Shamad al- Falimbani, 2000 :136-7).

Sudah sangat mendesak agar bangsa ini bercermin kepada bangsa yang telah mencapai kemajuan pada dimensi intelektual dan senantiasa kokoh dalam dimensi moralitasnya (pendidikan agama). Adapun kunci keberhasilan mereka terletak pada *political will* penentu kebijakan terhadap bidang pendidikan. Untuk itu, upaya merenovasi paradigma pendidikan di Indonesia mutlak dilakukan. Dalam hal ini, iman dan akhlak merupakan landasan utama sistem pendidikan nasional. Dengan bersandar pada keimanan, maka segala usaha dalam pendidikan yang berupaya membentuk kepribadian *insân kamîl* akan dapat tercapai dalam wujud peserta didik yang berakhlâq *al-karîmah*. Bila pendidikan mampu menciptakan sosok manusia ideal ini, maka manusia akan dapat menghadapi pelbagai persoalan kehidupan secara proporsional.

Untuk itu, pendidikan nasional perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu

: (1) pengembangan hendaknya berorientasi pada tujuan dan tugas manusia sebagai *<abd dan khalifah fi alardh*. (2) pengembangan berorientasi pada sifat dasar (*nature*) manusia. Manusia diciptakan Allah SWT dengan dibekali berbagai macam fitrah yang memiliki kecenderungan pada *alhanif* lewat tuntunan agamanya. Untuk itu, pola pendidikan harus mampu mengembangkan fitrah insaniah dengan multi potensi yang didelegasikan Allah tersebut sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. (3) pengembangan berorientasi pada tuntutan masyarakat dan zaman. Tuntutan ini berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan bermasyarakat, maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan akselerasi dunia modern. (4) Orientasi kehidupan ideal Islami yang mampu menyeimbangkan dan memadukan antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi.

Di antara penyebab lain terkoyaknya pendidikan (Islam) di tanah air adalah ketidakjelasan kurikulum. Kurikulum hari ini sesungguhnya tidak memenuhi standard yang jelas, baik pada aspek kebutuhan manusia, perkembangan psikologis peserta didik, maupun prinsip-prinsip kurikulum yang seyogyanya dijadikan acuan. Nyatanya, kurikulum menafikan kesemua itu dan tampil dengan “keangkuhannya” sendiri. Bahkan, kurikulum lembaga pendidikan Islam terkesan sebatas pengulangan dan jalan ditempat. Untuk itu, penyusunan kembali kurikulum pendidikan Islam menjadi pekerjaan yang tak bisa ditunda oleh Kementerian Agama. Renovasi kurikulum perlu dilakukan oleh orang yang mengerti dengan kurikulum dan materi keagamaan dalam sebuah Konsorsium Kurikulum.

Di sisi lain, tidak jalannya *reward* dan *funishment* karena beberapa persoalan, antara lain : **Pertama**, rendahnya partisipasi orang tua serta tersumbatnya komunikasi antara orang tua dan guru. **Kedua**, UU Perlindungan Anak dan KDRT menjadi penghambat dan sekaligus “aturan” yang menakutkan bagi tegaknya kedisiplinan dalam proses pendidikan. Seyogyanya, dalam melaksanakan proses pendidikan, diperlukan hukuman dan pengharagaan. Adapun fungsi hukuman dalam pendidikan (Islam) memiliki tujuan tertentu, yaitu :

1. Mencegah peserta didik untuk berbuat kejahatan. Diharapkan ketika disaksikan orang lain, maka akan timbul rasa malu dalam dirinya dan berjanji untuk tidak melakukannya.
2. Menimpakan rasa sakit kepada yang berbuat salah, setimpal dengan rasa senangnya dan bangganya dengan kejahatan yang dilakukannya.
3. Memperbaiki prilaku dan mentalitas orang yang melakukan kesalahan, sehingga tumbuh keinginan untuk mengubah prilaku kepada *akhlaq al-karimah*.

Hukuman dalam sistem pendidikan Islam, pada dasarnya memiliki nilai edukatif, yaitu untuk mencegah peserta didik dari melakukan berbagai kejahatan atau kesalahan. Dengan hukuman yang bersifat edukatif, diharapkan peserta didik akan malu, jera, dan berupaya memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Dalam pelaksanaannya, seorang pendidik hendaknya memberikan hukuman secara *ahsan*. Mereka dilarang memberikan hukuman secara kasar dan membahayakan diri peserta didik. Hukuman yang dilakukan secara kasar akan merusak mentalitas dan –bersamaan dengan itu-- menumbuhkan perasaan dendam pada diri peserta didik sebagai refleksi sakit hatinya. Di samping hukuman, proses pendidikan hendaknya ada pemberian pujian atas prestasi peserta didik. Pemberian ini dilakukan terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan dan memenuhi target pendidikan yang telah ditentukan. Pemberian pujian dimaksud agar peserta didik yang telah berbuat sesuai dengan pesan-pesan pendidikan, termotivasi untuk mempertahankan prestasinya, bahkan meningkatkannya secara maksimal. Sementara bagi yang belum memenuhi kriteria yang diinginkan akan berupaya untuk memperoleh derajat tersebut.

Perlunya memformulasi sistem pendidikan Islam yang proporsional, disebabkan karena pendidikan merupakan salah satu aspek yang strategis dalam upaya meluruskan dan membentuk pan-

dangan masyarakat tentang Islam secara *kaffah*. Pembaruan visi pendidikan yang demikian dilatarbelakangi oleh orientasi pendidikan umat (Islam) yang masih berorientasi pada ilmu-ilmu agama *an sich*, melalui pendekatan normatif-religius. Di sisi lain, ada pula format pendidikan yang dikembangkan telah tercerabut dari nilai-nilai ilahiah. Seyogyanya, orientasi pendidikan umat harus menyentuh dan mengakomodir aspek normatif-religius dengan aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan masyarakat (modern) secara harmonis dan integral. Ketika perkembangan pendidikan tidak bersifat dualistik, akan tetapi bersifat inklusif dan integral, serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka akan lahir dinamika intelektual yang pada gilirannya akan sangat membantu umat Islam mengejar ketertinggalannya selama ini. Munculnya sekolah-sekolah agama dengan versi dan warna baru, serta sarat dengan pesan-pesan yang bersifat inovatif dan modernis, sangat diperlukan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan ikut membentuk pola pemikiran umat lebih dinamis, adaptik, dan proporsional. Oleh karenanya, paradigma pembaruan pendidikan yang dikembangkan perlu lebih bersifat sebagai *renaissance* Islam (Taufik Abdullah, 1971 : 15) bagi terwujudnya –meminjam istilah Natsir-- *Islamietish Paedagogisch Ideaal* (Mochtar Naim, 1996 : 124).

Paradigma “baru” yang dikembangkan di atas, pada prinsipnya memiliki dasar pikir bahwa dalam perkembangannya, pendidikan Islam senantiasa dihadapkan pada tantangan yang berat dan kompleks, di banding tantangan yang harus dihadapi pada masa-masa sebelumnya. Tantangan tersebut telah menimbulkan aspirasi dan idealitas *multi interest* umat dalam menghadapi tuntutan hidup yang demikian kompleks. Untuk itu, alternatif pertama yang harus dilakukan adalah berusaha menghilangkan persoalan intern umat Islam. Persoalan-persoalan teologis yang difahami secara tradisional yang dianggap sebagai penghalang kemajuan, terutama dalam proses berfikir yang bersifat taklid, harus dihilangkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah memformulasi bentuk modernisasi dengan mempertimbangkan nilai fungsional bagi umat (Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, 1986 : 110-1). Mempertimbangkan paradigma modernisasi pendidikan yang demikian, disebabkan karena visi dan misi pendidikan Islam tidak lagi hanya sebatas mengantarkan manusia mencapai tujuan psikis-religius dengan menekankan pada pendidikan agama, akan tetapi juga pisik duniawi dengan menekankan pada pendidikan umum. Sistem pendidikan Islam era modern harus mampu menggabungkan kedua orientasi tersebut secara serasi dan seimbang. Untuk itu, pendidikan Islam era modern harus diformat dalam “paradigma baru” sejalan dengan akselerasi zaman, tanpa kehilangan identitas Ilahiah.

Sistem pendidikan Islam yang ideal seyogyanya berorientasi pada visi keakhiratan sebagai alat kontrol perilaku manusia, sekaligus visi kekinian dengan mengaktifkan fungsi akal peserta didik secara maksimal. Persentuhan kedua aspek tersebut secara harmonis dan integral, akan mampu menciptakan sosok peserta didik yang memiliki kepribadian paripurna (*insan kamil*). Melalui agama, dinamika rasio akan terkontrol dengan baik. Sedangkan melalui ilmu umum (rasional), akan ikut menyiapkan umat Islam mampu menjawab berbagai tantangan dinamika zaman secara aktif, dinamis, dan proporsional.

Upaya menggonggams ide-ide pembaharuan pendidikan (Islam) tidak hanya dilakukan melalui mimbar atau karya-karya tulis. Lebih lanjut, ide pembaharuan perlu diapresiasi secara nyata dalam pendidikan formal yang didukung oleh kebijakan nyata. Dengan upaya ini akan dimungkinkan terbangunnya warna pemikiran yang “merdeka” tanpa terbelenggu oleh suatu mazhab. Keterbelengguan umat terhadap suatu mazhab akan menimbulkan sikap eksklusif, taklid, dan memandang mazhab lain di luar dirinya sebagai kelompok yang ‘menyimpang’.

Kedudukan dan kewajiban peserta didik adalah berupaya memiliki akhlak mulia, baik secara vertikal maupun horizontal dan senantiasa mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan seperangkat ilmu pengetahuan, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah melalui

fitriah-Nya. Dalam hal ini perlu dikembangkan etika antara peserta didik dan pendidik. Meskipun seorang anak atau peserta didik telah berhasil memiliki ilmu pengetahuan dan kedudukan yang tinggi, akan tetapi ketika dihadapan orang tua –maupun pendidik-- hendaklah ia merendahkan diri dan menunjukkan akhlak yang mulia. Sikap yang demikian dapat memperhalus rasa kemanusiaan dan pengabdian peserta didik, baik kepada kedua orang tuanya, guru-gurunya, maupun –terutama-- terhadap Khaliqnya.

Dengan keluasan ilmu dan kehalusan akhlak yang dimilikinya, peserta didik dapat mengendalikannya, membersihkan hati, memiliki wawasan yang luas, dan meraih kesempurnaan. Melalui ilmu yang dimilikinya, peserta didik dapat mengenal Khaliqnya dan menambah keimanannya. Peserta didik hendaknya mencari guru yang banyak pengalamannya, luas ilmu pengetahuannya, bijaksana, pemaaf, tenang dalam memberikan pelajaran, dan sabar dalam menuntun serta mengarahkan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Sosok pendidik yang demikian akan sangat membantu peserta didik untuk senantiasa mengadakan kontak personal (diskusi) dengannya dari berbagai bidang keilmuan. Melalui kontak personal tersebut, akan terjalin ikatan batin antara peserta didik dan pendidik secara harmonis. Sikap ilmiah yang demikian sangat bermanfaat bagi peserta didik dalam rangka menyerap dan menguasai seluruh ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang pendidik.

Peserta didik hendaknya menyadari akan kekurangan dirinya dan berupaya untuk memperbaiki dengan cara meningkatkan mutu ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Proses peningkatan ini bukan hanya dilakukan melalui interaksi dengan pendidik, akan tetapi juga dapat dilakukan melalui belajar sendiri. Peserta didik hendaknya memiliki “keberanian” untuk menjelajah dunia ilmu pengetahuan dan melakukan penelitian tanpa henti. Dengan demikian, ia akan mendapatkan keutamaan wawasan yang luas, bukan sekedar “mengejar” ijazah dan prestise.

Dilihat dari segi peran dan fungsinya, pendidikan di manapun di dunia ini selalu dijadikan bahan tumpuan setiap orang untuk menatap masa depannya yang lebih baik. Harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan dalam arti dan ruang lingkup yang seluas-luasnya memang cukup beralasan, karena di manapun di dunia ini pendidikan menjadi kekuatan yang memberdayakan suatu bangsa. Amerika, Jerman, Jepang dan lainnya pernah mengalami keterpurukan. Namun mereka dengan penuh ketekunan dapat mengatasi keterpurukannya setelah mereka memperbaiki pendidikannya (Moh. Natsir, 1954 : 53). Studi yang dilakukan para tokoh pendidikan yang tercerahkan pada umumnya sepakat, bahwa tugas pokok pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk kepentingan masa depan kehidupannya. Ki Hajar Dewantara misalnya mengatakan bahwa pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tak boleh melanjutkan keadaan kemaren menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasaskan peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan (Ki Hajar Dewantara, 1962 : 15). Pendapat yang serupa juga dijumpai pada pendapat tokoh pembaharu pendidikan Islam di Minangkabau, Abdullah Ahmad (Ramayulis dan Samsul Nizar, 2005).

Dengan mempertimbangkan berbagai masalah yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas, pendidikan Islam ke depan dapat dirancang sebagai berikut : **Pertama**, pendidikan Islam harus dirancang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam secara sederhana dapat diartikan sebagai pendidikan yang dijiwai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Berbagai aspek tentang pendidikan, mulai dari visi, misi, tujuan, kurikulum, guru, murid, proses belajar mengajar, sarana prasarana, biaya, lingkungan dan evaluasi harus didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Evaluasi seyogyanya mampu menilai aspek intelektual, moral, emosional, dan spiritual. Evaluasi pendidikan hari ini bukan penerus kesalahan evaluasi elama ini yang hanya mengedepankan aspek intelektual yang mengand-

alkan pencapaian target nilai teoretis-formalitas dan menafikan aspek lainnya. **Kedua**, pendidikan Islam harus diarahkan pada upaya memberdayakan lulusan yang berkarakter unggul. Selain memiliki kemampuan dalam bidang wawasan kognitif dan pengetahuan (*to know*), peserta didik juga harus memiliki kemampuan mempraktekan pengetahuannya itu (*to do*), memiliki kepribadian dalam pola pikir dan tingkah lakunya (*to be*), dan dapat diamalkan bagi kepentingan bersama (*to life together*). Hal ini perlu dilakukan karena hingga saat ini dunia pendidikan belum dapat memberdayakan peserta didik. Upaya tersebut masih dapat ditambah dengan fungsi pendidikan bukan hanya mengasah dan mengembangkan akal, tetapi mengolah dan mengembangkan hati (moral), dan keterampilan (Mastuhu, 1999 : 49). Penerapan metode dan pendekatan pembelajaran yang memberdayakan tersebut sudah waktunya untuk diterapkan dengan segala implikasinya. Diketahui bahwa dengan menggunakan metode dan pendekatan teaching (*teacher centris*) proses pembelajaran memang berlangsung seadanya dengan bermodalkan bangku dan papan tulis. Sedangkan pada metode dan pendekatan belajar yang memberdayakan sebagaimana tersebut di atas mengharuskan adanya disain perencanaan pengajaran yang berbeda, tempat dan ruangan belajar mengajar yang movable dan variatif, kegiatan belajar mengajar variatif, pendanaan yang lebih banyak, serta tugas-tugas dosen yang lebih banyak pula.

Ketiga, pendidikan Islam harus dirancang dengan menerapkan prinsip demokrasi dan multikultural. Inti dari demokratisasi pendidikan sebagaimana terlihat pada teori James A. Beane dan Michael W. Appel, adalah pendidikan yang ditandai oleh adanya semua informasi penting yang dapat dijangkau semua *stakeholder*, sehingga semua unsur yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dapat menganalisa relevansi kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh dunia pendidikan memahami, mengkritisi dan memberi masukan, serta menentukan kontribusi serta partisipasi yang akan diberikannya untuk kesuksesan pelaksanaan program-program. Selanjutnya dalam membahas program-program sekolah, dan prosedur pengambilan keputusan juga memperhatikan berbagai aspirasi publik, serta dapat dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik. Demikian pula dengan pola pembinaan siswa atau mahasiswa, bahwa pendidikan itu untuk semua, guru/dosen harus mampu memberikan perhatian yang sama pada semua siswa/ mahasiswa tanpa membedakan antara yang sudah pandai dengan yang belum pandai, tidak membedakan antara yang rajin dan yang malas, semuanya memperoleh perlakuan, walaupun mungkin bentuknya berbeda (Dede Rosyada, 2004 : 16-17).

Munculnya gagasan pendidikan yang demokratis ini merata di seluruh dunia sebagai konsekuensi dari tidak ada lagi bangsa-bangsa di dunia yang dijajah. Secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai “pendidikan untuk/ tentang keagamaan kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, multi-kulturalisme dapat pula dipahami sebagai “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multikulturalisme seperti dipandang sebagai titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Di sini, multi-kulturalisme dapat dipandang sebagai landasan budaya (cultural basis) bagi kewargaan, kewarganegaraan dan pendidikan (Azyumardi Azra, Vol. I. No. 2, 2003 : 21).

Hubungan pendidikan multikulturalisme dengan demokrasi sebagaimana tersebut di atas, lebih lanjut dikemukakan oleh H.A.R. Tilaar sebagai berikut :

Pendidikan multikulturalisme berjalan bergandengan dengan proses demokratisasi di dalam kehidupan masyarakat. Proses demokratisasi tersebut dipicu oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia yang tidak membedakan perbedaan-perbedaan manusia atas warna kulit, agama, dan gender. Semua manusia diciptakan oleh Ilahi dengan martabat yang sama tanpa membeda-bedakan akan warna kulit, asal usul, agama, dan jenis kelamin (H.A.R. Tilaar, 2004 : 124).

Keempat, pendidikan Islam harus menyelenggarakan pendidikan agama dengan visi yang menjadikan agama sebagai dasar nilai dalam kajian berbagai disiplin ilmu, pedoman hidup, sumber etika, moral dan kultural dalam menghadapi dampak modernisasi dan globalisasi serta menjadikannya sebagai kepribadian dalam hidup. Ajaran agama yang dikehendaki adalah ajaran agama yang komprehensif, integratif, holistik, rasional, empirik, progressif, humanis, inklusif, kultural, aktual dan kontekstual sesuai dengan semangat ajaran agama yang terdapat di dalam kitab suci. Kecenderungan tersebut juga harus dipertimbangkan dalam pengembangan lembaga pendidikan, sehingga tidak kehilangan momentum dan relevansinya bagi kehidupan.

Muatan kebijakan pendidikan yang diramu dalam sistem pendidikan nasional, secara teoritis, merupakan sistem pendidikan yang cukup ideal bagi proses penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas. Akan tetapi, bila ditinjau pada dataran operasional, eksistensinya masih perlu dianalisa kembali, terutama terhadap sejauh mana keberadaan sistem tersebut mampu menghasilkan *out put* yang berkualitas, baik kualitas intelektual maupun kualitas moral.

Untuk melihat fenomena di atas, diperlukan tolak ukur atau kriteria tertentu, guna menilai sejauh mana operasionalisasi pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam telah mampu melahirkan dan mencetak sumber daya manusia seutuhnya yang berkualitas. Dalam hal ini, setidaknya ada dua kriteria yang bisa dipergunakan, sekaligus indikasi fenomena pendidikan tersebut, yaitu :

1. Pendekatan efektivitas.

Dalam mempergunakan pendekatan ini, setidaknya ada beberapa dimensi pendidikan yang perlu didekati dan dipertimbangkan. **Pertama**, dimensi prestasi studi (akademik) peserta didik. Pada dimensi ini pendekatan yang dapat dilakukan, adalah dari segi kemampuan peserta didik dalam meresponi setiap kegiatan interaksi proses belajar mengajar. Secara sederhana, kreativitas tersebut dapat dilihat dari angka (nilai) yang diperolehnya. Dipihak lain, dapat juga ditinjau apakah ada korelasi antara prestasi akademik dengan kemampuan operasional peserta didik, setelah mereka menyelesaikan studi, baik untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi maupun terutama kemampuan (skill) mereka dengan dan untuk memasuki lapangan pekerjaan (*link and match*). Pada umumnya, bagi perkembangan negara dunia ketiga, sering terjadi ketidakharmonisan antara prosentasi *out ut* pendidikan dengan tersedianya kesempatan lapangan kerja, terlihat sangat mencolok. Akibatnya, muncul suatu sikap skeptis yang memandang bahwa dilematika yang terjadi merupakan ketidakmampuan dan sekaligus kegagalan pendidikan dalam melaksanakan misinya. Hal ini disebabkan, karena proses pendidikan yang dilaksanakan banyak berorientasi secara teoritis dan bukan aplikatif (Philip Robinson, 1986 : 315). **Kedua**, dimensi proses pendidikan. Pada dimensi ini, dapat dilihat bagaimana kompetensi profesional yang dimiliki pendidik dalam meng*expose* seluruh potensi peserta didik dan peran aktif sosiokultural, maupun kebijaksanaan pemerintahan yang konduktif bagi optimalisasi pelaksanaan proses pendidikan (John S. Brubacher, 1950 : 127128).

Keberadaan sosiokultural suatu bangsa, dalam bentuk yang hidup merupakan suatu kesatuan yang memiliki bagianbagian yang saling terjalin antara satu dengan yang lain dan diikat oleh ikatanikatan internal yang merupakan pencerminan moral, cita rasa dan nilai sejarah satu bangsa. Ikatanikatan tersebut pada filirannya terakumulasi dan memberi karakter khas kepada kebudayaan manusia, sekaligus mencerminkan watak khusus bagi cara hidup (*way of life*) masyarakat dan begitu pula tingkah laku individunya. Artinya, kebudayaan yang dikembangkan mampu mendefinisikan keistimewaan individu secara dinamis yang bercorak kemanusiaan. Untuk itu, konsep *community-based education* (pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat) perlu dikembangkan dan menjadi wacana yang perlu mendapat perhatian secara serius. Di sisi lain, media pendidikan merupakan sarana yang paling baik untuk menanamkan nilai-nilai tersebut

secara optimal dan efektif. Optimalisasi ini dapat dilihat dari responsif peserta didik, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam kehidupan sehari-hari secara aktif dan dinamis (Alfian, 1982 : 1719). Di sisi lain, model kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan faktor yang ikut mempengaruhi visi, misi dan proses serta bentuk pendidikan yang ada. Oleh karena itu, antara pendidikan dan model kebijaksanaan politik pemerintahan suatu negara saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain secara integral. **Ketiga**, dimensi moralitas religius yang tertanan dan menjadi pilar dalam kepribadian peserta didik. Nilai ini akan memberikan warna dan *individualcontrol* pada seluruh aktivitas kehidupannya.

2. Pendekatan Efisiensi.

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pendidikan dapat mengantarkan peserta didik pada tujuan yang diinginkan secara optimal. Upaya ini dapat dilihat dari sejauhmana seluruh unsur yang ada dalam sistem pendidikan mampu menggunakan dan memanfaatkan fasilitas edukatis yang ada secara efektif-efisien (semaksimal mungkin). Nilai efisiensi pada dimensi ini setidaknya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : **Pertama**, kemampuan mengembangkan fasilitas tradisional secara profesional, sehingga keberadaannya mampu bernilai efisien. **Kedua**, kemampuan menggunakan fasilitas modern sebagai hasil kemajuan ilmu dan teknologi guna menunjang proses pendidikannya. Dengan dimensi ini, diharapkan pendidik mampu memperkenalkan berbagai fasilitas modern kepada peserta didiknya secara dialogis dan profesional.

Kecenderungan di atas muncul karena dilatarbelakangi keprihatinan bahwa, bagaimanapun juga --tidak dapat memungkiri-- arus globalisasi telah menembus seluruh aspek kehidupan manusia modern dewasa ini. Demikian pula dengan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, sebagai sarana pembentuk dan pelestari nilai kebudayaan manusia. Untuk itu, agar pendidikan tidak terkesan tertinggal, maka sistem dan operasionalisasi pendidikannya harus mampu memanfaatkan fasilitas teknologi modern dalam proses pendidikannya. Dengan hal ini, proses pendidikan seyogyanya dapat membawa dan mengenalkan fasilitas teknologi kontemporer kepada peserta didik, sehingga keberadaannya mampu dimengerti dan difahami serta dimanfaatkan dalam kehidupannya secara luas, tanpa mengorbankan kebudayaan bangsa dan nilai-nilai religius yang diyakininya (I. Made Pidarta, 1988 : 112). Keterkaitan agama dengan realitas sosial akan menumbuhkan generasi masa depan yang memiliki kepekaan terhadap dinamika masyarakatnya. Operasionalisasi upaya ini dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan melalui metode darmawisata. Metode ini dimaksudkan agar tumbuh kepekaan sosial pada setiap peserta didik. Seorang pendidik bisa mempergunakan metode darmawisata untuk mengenalkan peserta didik pada realitas lingkungannya secara dekat dan konkrit (Philip H. Phinex, 1966 : 243 ; John Dewey, 1964 : 306-12). Melalui pengenalan terhadap lingkungannya, peserta didik akan lebih banyak terlibat langsung terhadap objek dan mengetahui hubungan dari apa yang dilihat dengan pelajarannya. Hanya saja dalam pelaksanaannya, perlu dipertimbangkan aspek nilai pendidikan yang dicapai dan tidak membahayakan keselamatan peserta didik.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini dapat dilihat dari dua kawasan, yaitu :

Pada lingkungan internal (dalam negeri) terdapat pula dua bentuk perubahan :

Masyarakat Indonesia sekarang sedang mengalami proses reformasi multi dimensi, dimana sedang terjadi proses transformasi total menuju masyarakat baru yang demokratis dan terbuka. Masyarakat baru yang diidam-idamkan itu disebut masyarakat madani (*civil society*).

Tuntutan reformasi dalam berbangsa dan bernegara, maka lahirlah undang-undang No. 22 tahun

1999 tentang otonomi daerah dan selanjutnya sebagai implementasi dari undang-undang tersebut maka sejak tahun 2001 desentralisasi mulai diberlakukan di Indonesia dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Meskipun masalah pendidikan tidak termasuk kedalam bidang yang diotonomikan, tetapi pengaruhnya terhadap pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan akan sangat terasa.

Pada lingkungan eksternal (luar negeri) terdapat pula dua bentuk perubahan :

Semenjak tahun 2003 telah diberlakukan perjanjian perdagangan bebas (AFTA) dinegara-negara ASEAN, sehingga kawasan ASEAN telah menjadi pasar bebas. Negara-negara dikawasan dunia lain seperti Asia Pasific, pada tahun 2020 juga akan menjadi pasar bebas dan era keterbukaan internasional. Jiwa perjanjian tersebut, sejalan dengan semakin majunya teknologi dan komunikasi adalah negara-negara yang bersangkutan membuka pintu lebih lebar lagi untuk *free trade* dan *free investment* keterbukaan dan bebasnya lalu lintas manusia, barang dan informasi antar negara tertentu punya pengaruh terhadap pendidikan.

Kemajuan teknologi pada abad 21 ini, terutama teknologi industri menyebabkan semakin banyaknya komoditi yang diproduksi. Akibatnya berbagai barang ditemukan di pasar, dan dimotivasi oleh iklan yang berusaha menciptakan selera baru konsumen, sehingga mereka menjadi sangat konsumtif, dan materialistik. Efek lain dari kemajuan teknologi, meyebabkan manusia merasa bagian atau pelayan dari mesin. Hubungan persaudaraan semakin tipis, manusia merasa kehilangan jati diri dan nilai spiritual. Manusia modern hidup teralinasasi dari dirinya, dari masyarakat, dan dari Tuhan-nya.

Perubahan yang terjadi baik skala nasional maupun berskala internasional mempunyai implikasi terhadap pendidikan.

Jacques Delors selaku Ketua Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad 21 dari Persatuan Bangsa-Bangsa, dalam laporannya: "*Learning: The Treasure Within*" (1996), mengemukakan tujuh macam ketegangan yang akan terjadi serta menjadi ciri dan tantangan pendidikan abad 21, yaitu :**Pertama**, ketegangan antara global dengan lokal : Orang secara berangsur-angsur perlu menjadi warga negara dunia, tetapi jangan sampai tercerabut akar mereka dari kehidupan berbangsa dan bernegara. **Kedua**, ketegangan antara universal dengan individual : Proses globalisasi menyebabkan seseorang berbudaya global akan tetapi jangan sampai meyebabkan budaya lokal mereka menjadi terancam. **Ketiga**, ketegangan antara tradisi dengan kemoderenan : Teknologi informasi baru dapat mengusur tradisi yang berlaku didalam masyarakat, namun yang perlu diusahakan bagaimana tradisi tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. **Keempat**, ketegangan antara jangka pendek dan jangka panjang : Kemajuan media informasi menyebabkan orang harus memecahkan suatu masalah secara cepat. Namun tidak seluruh masalah yang dapat diselesaikan secara cepat, sebab banyak masalah yang harus diselesaikan dengan sabar, terencana, dengan berbagai pendekatan, dan dengan musyawarah. **Kelima**, ketegangan antara kompetisi dengan kesamaan kesempatan, globalisasi menyebabkan orang berkopetensi untuk mencapai sesuatu sehingga kerja sama (kooperasi) dan solidaritas sosial menjadi tergesur. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita melaksanakan kompetensi yang sehat suatu kompetensi yang tidak merugikan orang lain dan bahkan kalau perlu dapat melibatkan orang lain. **Keenam**, ketegangan antara banyak dan luasnya pengetahuan dengan kemampuan manusia untuk menyerapnya : Perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan munculnya pengetahuan baru yang perlu dikuasai. Pada hal daya serap manusia terbatas. Untuk itu perlu penseleksian terhadap pengetahuan baru yang sesuai dengan kebutuhan. **Ketujuh**, ketegangan antara spiritual dengan material : Pengetahuan yang datang dari Barat yang bersifat sekuler dan

materialistik menyebabkan tergesurnya hal-hal yang bersifat spiritual. Padahal ada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia yang membutuhkan spiritual dan transedental.

Perubahan internal (dalam negeri) terjadi secara simultan dengan perubahan eksternal (lingkungan luar negeri), telah menempatkan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam posisi yang serba sulit. Secara internal kita belum begitu siap melakukan perubahan – sekarang datang lagi tantangan dari luar negeri (eksternal) yang menghendaki kita siap tidak siap, mau tidak mau harus menerima perubahan internasional tersebut. Dari semua rangkaian perubahan tersebut, yang menjadi persoalan adalah : “Bagaimana seharusnya pendidikan memosisikan dan memerankan dirinya dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang sedang dan akan terjadi?”.

Akhir-akhir ini terjadi pergeseran pandangan masyarakat terhadap pendidikan seiring dengan tuntutan masyarakat (*social demand*) yang berkembang dalam skala yang lebih makro. Kini, masyarakat melihat pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap perolehan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks waktu sekarang saja tetapi disisi lain, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi, baik modal maupun manusia (*human and capital investmen*) untuk membantu meningkatkan keterampilan hidup (*life skill*) dan pengetahuan (*knowledge*) sekaligus mempunyai kemampuan produktif dimasa depan yang diukur dari tingkat penghasilan yang diperolehnya. Karena itu, tidak mengherankan apabila pendidikan selalu dipertimbangkan nilai imbalannya (*rate of return*), berapa besar investasi serta keuntungan yang akan diperolehnya. Lembaga pendidikan (Islam) yang tidak dapat memberikan nilai imbal pada masa yang akan datang tidak akan dilirik orang.

REAKTUALISASI PENDIDIKAN ISLAM

Dalam rangka reaktualisasi pendidikan Islam, maka sistem pendidikan harus direformasi, direstrukturisasi, dan diinovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat era pasar bebas.

MENGHADAPI OTONOMI DAERAH

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan yang mendasar terhadap pendidikan . Walaupun pendidikan termasuk dalam bidang yang diotonomikan, namun perlu melakukan reposisi sebagai responsif dan antisipatif terhadap perubahan, meliputi :

Lembaga pendidikan tidak lagi harus tampil dalam bentuk yang uniform dan tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Ia perlu diberi kesempatan berkembang senafas dengan aspirasi lingkungannya. Kualitas hasil pendidikan akan dinilai oleh masyarakat. Demikian hidup dan matinya lembaga pendidikan akan ditentukan oleh masyarakat pula.

Perlu adanya kerja sama antara Kemendiknas, Kemenag dan kementerian lain yang menyelenggarakan pendidikan dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab pada aspek pembiayaan, kelembagaan dan manajerial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Orientasi pengorganisasian dan pengelolaan lembaga pendidikan diarahkan kepada terciptanya hubungan timbal balik antara lembaga pendidikan dan masyarakat dalam rangka memperkuat posisi lembaga pendidikan sebagai lembaga pendidikan. Pemerintah Daerah, dalam hal ini berperan sebagai fasilitator dalam rangka pembinaan terhadap pengorganisasian dan pengelolaan lembaga pendidikan melalui kebijakan strategis yang dapat menjamin eksistensi lembaga pendidikan, sehingga dimungkinkan adanya subsidi dari pemerintah, baik finansial maupun bantuan teknik dan ketena-

gaan. Organisasi pendidikan di daerah harus lebih baik dari sebelumnya, ramping, lincah, efektif dan efisien. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka manajemen pendidikan yang dikembangkan adalah manajemen sekolah dan manajemen berbasis masyarakat menjadi prioritas, begitu juga pengembangan kemampuan organisasi dan manajerial. Pengembangan ini dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif diikuti dengan peningkatan sumber daya manusianya, sumber daya finansialnya, sumber daya masyarakat dan sumber daya pendukung lainnya.

Menyangkut persoalan normatif-filosofis, yang sampai sekarang masih diperdebatkan para pelaku *desision maker* pendidikan. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus melakukan reorientasi. Reorientasi dilakukan oleh pelaksana pendidikan dengan mengkaji ulang tentang masalah normatif filosofis yang sering diperdebatkan. Dalam hal ini perlu melibatkan para pakar sesuai dengan bidang keahliannya. Masalah normatif-filosofis ini perlu menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Masalah tujuan pendidikan misalnya; jika rumusan tujuan pendidikan kurang jelas, maka komponen-komponen lain dalam sistem pendidikan tidak dapat melaksanakan fungsinya secara baik. Hal ini disebabkan dalam sistem pendidikan, seluruh komponen-komponennya selalu berorientasi kepada pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam persoalan yang berkaitan dengan praktek pendidikan perlu dilakukan perubahan paradigma sebagai berikut :

Pengelolaan tenaga kependidikan harus efektif dan profesional. Tenaga kependidikan dalam lembaga pendidikan terdiri atas guru dan tenaga kependidikan lainnya seperti pegawai tata usaha, guru bimbingan, petugas perpustakaan dan sebagainya. Tenaga kependidikan, terutama guru yang profesional merupakan jiwa dari lembaga pendidikan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja yang bersifat manusiawi dan imbalan jasa merupakan perhatian yang amat penting bagi pimpinan lembaga pendidikan.

Pembiayaan pendidikan tidak cukup diperoleh dari pemerintah/negara saja tetapi yang lebih utama sebenarnya adalah dari lembaga dan dari masyarakat. Dari hasil penelitian terdapat korelasi positif antara kualitas lulusan dengan dana pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka lembaga pendidikan harus berusaha mencari sumber dana yang halal diantaranya : (1) Membentuk badan usaha atau koperasi, (2) Bekerja sama dengan negara-negara yang kaya sumber daya alamnya, (3) Mengusahakan sumber dana dari waqaf produktif, (4) Menyediakan dana abadi, (5) Membentuk lembaga LAZIS, (6) Mencari sumbangan dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran : dari metode guru yang otoriter dan instruktif menjadi guru yang bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing pengalaman belajar – dari sistem pembelajaran yang verbalis menjadi sistem belajar yang menemukan *insight* – dari sistem evaluasi yang berorientasi subjek menjadi sistem evaluasi yang didasarkan kompetensi – dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik – dari belajar dengan mendengar menjadi belajar dengan melakukan – dari komunikasi yang tertutup menjadi komunikasi terbuka – dari *one way communication* menjadi *multi way communication* – dari kurikulum yang *subject matter* menjadi kurikulum yang berbasis kompetensi.

Demokratisasi dalam proses pembelajaran. Hal ini akan memberikan kepada semua peserta didik kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Adanya sekolah unggul mempunyai implikasi diskriminasi pada peserta didik sebab semua sumber daya harus diperuntukan untuk yang unggul saja. Oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh peserta didik adalah memberikan pelayanan unggul berupa intensitas dan kualitas kegiatan belajar dan layanan bimbingan yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik, dan bukan yang pintar saja.

Melaksanakan efisiensi pendidikan melalui (1) Manajemen pendidikan yang dapat memberday-

akan peran serta masyarakat, institusi dan tenaga kependidikan secara demokratis dan efisien. (2) Pengelolaan anggaran berorientasi kepada efisiensi dan ketergunaan. (3) Pemanfaatan gedung, alat perlengkapan sekolah dan media pendidikan lainnya secara maksimal. (4) Tidak ada potensi dan SDM tenaga kependidikan yang tidak dimanfaatkan. (5) Konflik internal yang bersifat non akademis dijauhkan. (6) Fasilitas lembaga yang sederhana, namun nyaman dan fungsional. Mempergunakan produk lokal dan kalau perlu dibikin sendiri oleh lembaga. (7) Perencanaan dan pengelolaan akademik, administrasi dan keuangan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya relevansi antara hasil pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja yang diwujudkan melalui kurikulum yang sarat dengan materi yang fungsional terhadap tuntutan masa depan peserta didik berupa keterampilan memasuki dunia kerja. Hal ini dapat diwujudkan apabila kerjasama yang serasi antara dunia usaha sebagai pengguna hasil pendidikan dan lembaga pendidikan, serta pentingnya penekanan pada aspek kreativitas dalam proses pendidikan.

Agar lulusan lembaga pendidikan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai standar mutu nasional dan internasional, kurikulum perlu dikembangkan dengan pendekatan berbasis kompetensi, terutama penguasaan bahasa dan IT. Hal ini perlu dilakukan agar sistem pendidikan dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta tuntutan desentralisasi.

Sasaran akhir kurikulum sebenarnya adalah pengalaman belajar. Untuk itu setiap siswa harus memiliki keterampilan belajar mandiri untuk membuatnya mentransformasikan materi ajar menjadi pengalaman belajar melalui kegiatan belajar. Dengan keterampilan itu, siswa dapat mendalami dan menambah sendiri pengetahuan yang telah dikuasainya, dengan sedikit atau tanpa bimbingan guru.

Evaluasi belajar secara teratur dan berkelanjutan, bukan hanya ditujukan untuk mengetahui daya serap dan kemampuan para peserta didik saja, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan program. Oleh karena itu, fungsi evaluasi program menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas *in-put*, proses dan *product* serta tujuan pesantren secara keseluruhan dan secara terus menerus. Evaluasi program dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi serta mempermudah kontrol dan perbaikan sistem serta proses.

Upaya di atas perlu disinergikan dengan melakukan transformasi nilai-nilai agama dan budaya pada peserta didik. Melalui upaya ini, kualitas lulusan pendidikan negeri ini akan memiliki keunggulan dan sekaligus nilai jual lebih baik. Melalui upaya merenovasi format pendidikan Islam yang berkualitas, maka kualitas lulusan akan dapat bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan di kawasan ASEAN.

PENUTUP

Masa depan generasi yang akan datang sangat tergantung dengan warna dan bentuk apa yang ditanam oleh generasi hari ini. Tatkala yang dipertontonkan adalah kejahatan yang menghalalkan segala cara meski harus melanggar hukum dan agama, maka generasi akan datang mungkin akan jauh lebih piawai memainkan bentuk kejahatan baru yang lebih canggih. Tapi, tatkala yang ditanam hari ini mampu memproses lahirnya generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, maka kejahatan yang merusak citra bangsa ini akan dapat diputuskan mata rantainya. Bila demikian, bagaimana mungkin lembaga pendidikan akan mampu membentuk keperibadian out putnya yang utuh. Semua ini akan bisa di atasi tatkala seluruh komponen memegang teguh prinsip rasionalitas yang terbimbing oleh wahyu dan nilai objektif ilmu pengetahuan. Perahu tersebut

hanya bisa diselamatkan tatkala seluruh elemen yang ada pada kapal tersebut adalah *out put* pendidikan yang mampu membangun kecerdasan IQ, EQ, dan SQ secara integral. Untuk itu, kearifan nan bijak perlu dikedepankan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan (Islam). Sebab, kesalahan dalam menetapkan kebijakan pendidikan akan berakibat fatal dan terkoyaknya keberibadian generasi.

Tatkala kepedulian terhadap dunia pendidikan tidak diperbaharui, maka dunia pendidikan akan semakin terkoyak. Sudah saatnya system dan pengawasan pendidikan di negeri ini ditinjau ulang dan disusun secara professional, tanpa indikasi subyektif dan mementingkan diri atau kelompok semata. Melalui kepedulian membangun pendidikan Islam ideal, maka institusi pendidikan Islam di nusantara akan menjadi corong perubahan bagi menjawab berbagai persoalan keummatan, terutama di kawasan ASEAN.

Wa Allahu'lam bi al-shawwab.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfian, *Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1982)
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Multikultural Membangun Kembali Indonesia Indonesia Bhinneka Tunggal Ika*, dalam Tsaqafah, Vol. I. No. 2, 2003
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. (Jakarta: Prenada Madia, 2004)
- Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam ; Rekonstruksi Pemikiran Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung : Mizan, 1986)
- Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: The University of Chicago, 1979)
- H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2004)
- H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia; Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999)
- HAMKA, *Falsafah Hidup*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1994)
- HAMKA, *Lembaga Hidup*, (Jakarta : Djajamurni, 1962)
- HAMKA, *Tasauf Modern*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1987)
- I. Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1988)
- John Dewey, *Democracy and Education*, Fourth Edition, (New York : The Macmillan Company, 1964)
- John S. Brubacher, *Modern Philosophies of Education*, (New York : McGrawHill Book Company, Inc., 1950)
- Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1962)
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Mochtar Naim, "Mohammad Natsir dan Konsep Pendidikan Integral", dalam Anwar Harjono, et-al, *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996)
- Moh. Natsir, *Kapita Selecta*, (Bandung: W. Van Hoeve, 1954)
- Philip H. Phinex, *Philosophy of Education*, (New York : Holt, Rinehart and Winston, 1966)
- Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1986)
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia*, (Jakarta : Quantum Teaching, 2005)
- Rupert C. Lodge, *Philosophy of Education*, (New York : Harper & Brothers, 1974)
- Samsul Nizar (ed.), *Reformulasi Pendidikan Islam Menghadapi Pasar Bebas*, (Jakarta : The Minangkabau Foundation, 2005)
- Samsul Nizar, "Potret Suram Dunia Pendidikan", dalam *Harian Padang Ekspres*, edisi 12 Juni 2003.
- Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008).
- Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta : Quantum Teaching, 2005)
- Syed Hossein Nasr , *Tradisional Islam in the Modern World*, (London : Longman, 1987)
- Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, *Hidayatus Salikin*, diedit kembali oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah, (Kuala Lumpur, Khazanah Fathaniyah, 2000)
- Taufik Abdullah, *School and Politic ; The Kaum Muda Movement in West Sumatera 1927-1933*, (New

York : Cornel University, 1971)